

SEMINASIA

(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

“Membangun Bangsa Melalui Pembangunan Ekonomi Perdesaan”

25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

^a Suharyanto ^bJulizar Idris
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten
e-mail : asuharyanto.stiabanten@gmail.com , bIdrisjulizar@gmail.com

Abstrak

Pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable development tourism*) telah banyak di terapkan di seluruh dunia. Namun, masih banyak di temukan masalah kepariwisataan di tempat destinasi wisata. Pendekatan pengembangan pariwisata berkelanjutan pada dasarnya adalah pengembangan pariwisata yang menjaga kelestarian lingkungan, sumber daya alam dan budaya yang ada pada wilayah pengembangan sebagai respon dari permasalahan pariwisata berbasis *sustainable development* di Propinsi Banten. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan data sekunder berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Propinsi Banten, Indonesia, artikel nasional dan Internasional, selain itu penulis melakukan analisis dengan studi pustaka dari berbagai literature berkaitan tentang pariwisata berkelanjutan. Kemudian visualisasi dianalisis dengan menggunakan *software VOSviewer* yang mengacu pada berbagai referensi-referensi yang telah digunakan dalam berbagai penelitian di Indonesia. Hasil artikel ini menunjukan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Propinsi Banten belum optimal. Hal ini dapat di lihat dari kondisi fasilitas yang kurang maksimal, komitmen pemerintah yang belum maksimal dan kolaborasi anatar pemangku kepentingan yang belum selaras . Pada akhirnya, artikel di masa mendatang perlu mengevaluasi program kebijakan pengembangan pariwisata berbasis *sustainable development* di Propinsi Banten.

Kata Kunci: Kebijakan ; Pengembangan pariwisata berbasis *sustainable development*

Abstract

Sustainable tourism development has been widely implemented throughout the world. However, many tourism problems are still found in tourist destinations area . The approach to sustainable tourism development is basically tourism development that maintains the sustainability of the environment, natural resources and culture in the development area as a response to tourism problems. This article aims to explain the policy in developing tourism based on sustainable development in Banten Province. The method used is qualitative. The data collection technique used is using secondary data based on data from Central Statistics agency of Banten Province, Indonesia, National and International articles., in addition the author conducted an analysis with a literature study of various literature related to sustainable tourism. Then the visualization was analyzed using VOSviewer software which refers to various references that have been used in various studies in Indonesia. The results of this article show that the sustainable tourism development policy in Banten Province is not optimal. This can be seen from the condition of the facilities that are less than optimal, the government's commitment is not optimal and the implementation of sustainable tourism development is less than optimal. In the end, future articles need to evaluate the sustainable development-based tourism development policy program in Banten Province.

Keyword : Policy ; Sustainable development based tourism development

A. PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan suatu pengejawantahan aturan sesuai dengan situasi dan kondisi suatu tempat, wilayah atau lingkungan yang telah di tetapkan oleh orang atau pejabat yang berwenang. Menurut Anderson (1984) menuturkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang di lakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah (Dr. Arifin Tahir, 2020:21). Mustopadidja mengatakan istilah kebijakan lazim dikaitkan dengan program atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya yang di tuangkan dalam bentuk peraturan (Dr. Arifin Tahir, 2014:21). Dari pengertian kebijakan diatas dapat di simpulkan bahwa kebijakan adalah suatu konsep yang di tuangkan oleh seseorang atau pejabat secara sistematis untuk menjadi landasan arahan atau pedoman dalam bertindak atau melaksanakan suatu aktifitas dalam mencapai suatu tujuan yang di inginkan. Namun, kebijakan sering tidak selaras dengan peraturan karna adanya faktor situasi dan kondisi tertentu. Selain itu, peraturan merupakan suatu pemaknaan yang harus di kerjakan. Pada prinsipnya kebijakan selalu merujuk pada peraturan yang berupa undang undang atau peraturan pemerintah.

Pencapaian pariwisata berkelanjutan tidak dapat diabaikan dari peran strategis praktek administrasi publik yang efektif. Praktek administrasi publik harus selaras dengan pemangku kepentingan. Diskusi tantangan potensi harapan pemangku kepentingan, cara kerja dan kualita dari administarsi publik setiap periode waktu di setiap tingkatan harus sinergis dengan kesiapan dan dukungan kondusif praktek administasi publik yang efektif (Santoso, 2019).

Dalam konteks pembangunan pariwisata, kebijakan merupakan salahsatu kunci kesuksesan atau

keberhasilan suatu pembangunan pariwisata dalam mencapai tujuan yang di inginkan. Program atau kegiatan pariwisata yang di rancang oleh pemerintah dalam upaya merespons *public problem* yang ada dalam masyarakat. Pemerintah memandang *public problem* harus di pecahkan, Namun pada kenyataannya tidak semua masalah dapat di atasi oleh Pemerintah, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki peran dan tanggungjawab atas pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dari permasalahan tersebut akan dirancang kebijakan berdasarkan kepentingan umum (*Public Interest*). Dalam hal kepentingan umum ini di harapkan muncul adanya agenda *setting* dari Pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut menjadi sebuah kebijakan publik (*public policy*). Thomas R. Dye (2013) menuturkan bahwa Kebijakan adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Indriani, 2025).

Pariwisata adalah perjalanan untuk mencari kenikmatan sesaat, kenikmatan itu bersumber dari keindahan alam, kekhasan budaya, makanan dan minuman, hewan dan lain sebagainya (Dr. Muharto, S.Pd.I., 2021:8). Secara etimologis, pariwisata terdiri dari kata ‘wisata’ yang berarti perjalanan (*traveling*); kata wisatawan yaitu orang yang melakukan perjalanan (*traveler*), dan kepariwisataan yaitu kegiatan atau segala sesuatu berhubungan dengan pariwisata. Kegiatan pariwisata membawa pengaruh sosial, ekonomi dan kebudayaan yang timbul sebagai efek dari perjalanan wisata (Pradana, 2019).

Berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 pasal 1 di jelaskan bahwa pariwisata adalah sebagai salah satu sektor penting dalam ‘perekonomian nasional’, sehingga perlu di pertimbangkan dan

SEMINASIA

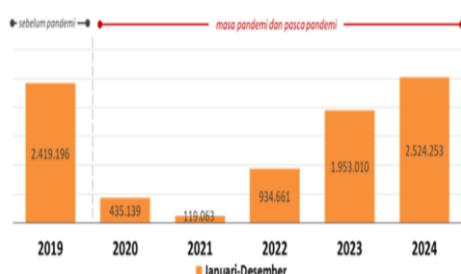
(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

“Membangun Bangsa Melalui Pembangunan Ekonomi Perdesaan”
25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Di pertahankan keberlanjutan pengembangan wisata yang berkelanjutan, di dasari dari integrasi tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan budaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan. (Allokendek et al., 2024) Dalam perencanaan pengembangan daerah tujuan wisata ada beberapa unsur yang perlu dan harus di ketahui yaitu (1) Wisatawan, (2) Aksebilitas, (3) Daya tarik wisata, (Atraksi wisata), (4) Fasilitas wisata, (5) Sumber daya manusia (masyarakat lokal), (6) Sumber daya alam dan budaya, (7) Informasi, (8) Harga, (9) Organisasi pariwisata, (10) Karakteristik daerah (Mohamad Ridwan, S.T., M.Sc., Dr. Windra Aini, 2019).

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Banten, Selama tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tujuan Propinsi Banten mencapai 2,52 juta kunjungan, naik 29,25 persen dibandingkan tahun 2023. Bahkan, jumlah kunjungan ini sudah melampaui capaian kunjungan pada tahun 2019 (sebelum covid-19), yang mencapai 2,49 juta kunjungan desember 2024. Seperti yang di tunjukan dalam gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Perkembangan Tahun Kujungan Wisatawan Mancanegara Propinsi Banten, 2024



B.

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Banten,
2025.
<https://banten.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/03/852/perkembangan-pariwisata-banten-->

Selanjutnya, perkembangan jumlah perjalanan wisatawan nusantara tujuan Propinsi Banten sepanjang tahun 2024 secara umum menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan pada tahun sebelumnya. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara pada tahun 2024 mencapai 48,26 juta perjalanan, atau meningkat 8,69 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 44,40 juta perjalanan desember 2024. Seperti yang di tunjukan dalam gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2. Perkembangan Tahun Kujungan Wisatawan Nusantara Propinsi Banten, 2024

Kab/Kota Tujuan	Jumlah Perjalanan (Ribu)						Perubahan (%)		
	Desember 2023	November 2024	Desember 2024	Jan-Des 2023	Jan-Des 2024	Des'24 thd Des'23	Des'24 thd Nov '24	Jan-Des'24 thd Jan-Des'23	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Kab. Pandeglang	344,24	208,68	276,57	3.317,27	3.182,99	-19,66	32,53	-4,05	
Kab. Lebak	340,10	247,81	310,40	2.934,57	3.242,69	-8,73	25,26	10,50	
Kab. Tangerang	1.399,41	1.056,18	1.338,08	12.631,49	13.472,50	-4,38	26,69	6,66	
Kab. Serang	440,14	424,27	544,26	3.913,14	4.964,52	23,66	28,28	26,87	
Kota Tangerang	979,44	749,91	987,02	8.686,13	9.801,12	0,77	31,62	12,84	
Kota Cilegon	178,20	129,65	171,60	1.972,93	1.752,37	-3,70	32,36	-11,18	
Kota Serang	254,12	234,43	336,55	2.536,90	2.759,45	32,44	43,56	8,77	
Kota Tangerang Selatan	868,40	724,09	932,16	8.407,07	9.082,23	7,34	28,74	8,03	
Banten	4.804,05	3.775,02	4.896,65	44.399,50	48.257,85	1,93	29,71	8,69	

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Banten,
<https://banten.bps.go.id/id/pressrelease/2025/02/03/852/perkembangan-pariwisata-banten-->

Meskipun kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan Propinsi Banten meningkat, Namun, ketimpangan manfaat ekonomi , pelestarian lingkungan masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Masalah klasik dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan diantaranya adalah : rendahnya sumber daya manusia pariwisata, Kolaborasi yang belum optimal antar pemangku kepentingan, buruknya sarana dan prasarana dan manajemen pengelolaan destinasi wisata yang belum di kelola dengan baik.

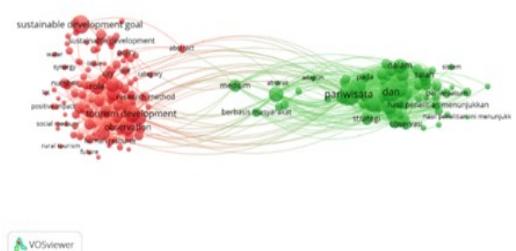
SEMINASIA

(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

“Membangun Bangsa Melalui Pembangunan Ekonomi Perdesaan”

25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Kajian kebijakan pengembangan pariwisata telah di teliti dalam beberapa aspek. Hal ini dapat di lihat pada visualisasi yang di tujuhan pada gambar 3.



Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis pembangunan berkelanjutan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan dalam kualitas fasilitas pantai dan daya tarik wisata. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Mukti (2024) menemukan revitalisasi pantai Legon Guru Seaside mengintegrasikan perbaikan infrastruktur, pembangunan fasilitas wisata, dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam mencapai pengembangan wisata yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung oleh penelitian oleh Benjiro Stevano Lepar & Wiwik Nirmala Sari (2024) menunjukkan perlunya strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan perlunya strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelatihan berkelanjutan bagi anggota Pokdarwis. Selain itu penelitian oleh Afrilia Elizabet Sagala (2023) menunjukkan keterkaitan empat pilar pembangunan pariwisata yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan, pilar industri belum mendukung secara maksimal dikarenakan baru didukung oleh homestay dari masyarakat yang minim pengetahuan dalam pelayanan dan pengelolahan limbah. Namun, meskipun ada banyak penelitian terkait pengembangan pariwisata berkelanjutan dalam konteks kebijakan

pariwisata berbasis *sustainable development* masih sangat terbatas khususnya di Propinsi Banten. Hal ini Propinsi Banten mengindikasikan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan pengembangan pariwisata berbasis *sustainable development* untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan memberikan gambaran lebih jelas mengenai tantangan yang ada.

Berdasarkan pertanyaan penelitian masalah dan *state of the art*, peneliti membuat rumusan masalah bagaimana “ Kebijakan pengembangan pariwisata berbasis *sustainable development* di Propinsi Banten?”

B. PEMBAHASAN

1. Potensi Pariwisata Propinsi Banten

Letak geografis Provinsi Banten secara umum merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut, serta memiliki beberapa gunung dengan ketinggian mencapai 2000 meter di atas permukaan laut. Wilayah Provinsi Banten bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Sunda (Darma, 2019.)Sebagai provinsi yang dirancang menjadi salah satu wilayah perlintasan antara pulau Jawa dan Sumatra, Propinsi Banten memiliki potensi pariwisata yang besar. Terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2012 yang menetapkan Tanjung Lesung sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Salah satu keindahan wisata alam terbaik adalah Taman Nasional Ujung Kulon sebagai *Natural World Heritage Site* yang telah di tetapkan Oleh Komisi Warisan Dunia UNESCO, memiliki keanekaragaman kekayaan hayati dan ekosistem yang unik serta keberadaan spesies langka badak Jawa dan badak

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

“Membangun Bangsa Melalui Pembangunan Ekonomi Perdesaan”
25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

bercula satu. Potensi budaya wisata cagar budaya yang sangat terkenal menjadi wisata religi adalah Banten Lama yang merupakan bekas peninggalan sejarah kerajaan Banten, daya tarik wisatanya seperti; ziarah ke makam Sultan Hasanudin Banten, keraton surosowan, masjid agung Banten Lama, tempat pemandian bersejarah Watu Gilang dan Danau Tasik Kardi (Elizabet Sagala, 2024). Salah satu wisata pantai terindah adalah Tanjung Lesung. Kawasan resort pantai terbesar dengan area seluas 1500 hektar dan telah menjadi pilihan wisatawan lokal dan mancanegara. Keunikan Desa wisata suku baduy juga merupakan daya tarik budaya propinsi Banten.

Pengembangan pembangunan Pariwisata memerlukan beberapa prinsip dasar yaitu: (1) Prinsip *Co-Ownership* bahwa kawasan wisata adalah milik bersama untuk itu ada hak masyarakat yang harus di akui. (2) Prinsip *Co-Operation* bahwa kepemilikan bersama membawa konsekwensi pengelolaan di lakukan bersama seluruh pemangku kepentingan. (3) Prinsip *Co-Responsibility* bahwa keberadaan kawasan Pariwisata menjadi tanggung jawab bersama.

2. Prinsip prinsip Pariwisata berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan bertujuan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan nilai-nilai sosial budaya yang mencangkup tiga pendekatan : Pendekatan *holistik*: isu pembangunan dan lingkungan terintegrasi dalam lingkungan sosial global, *Futurity*: fokus pada kapasitas jangka panjang untuk kelanjutan yang adil dan merata kelanjutan ekosistem global, *Fainess* : pembangunan dapat di akses menggunakan sumber daya semua masyarakat, baik di masa sekarang maupun masa depan (Sharpley, 2000). Menurut *World Trad*

Organization (2005:12) “Pariwisata berkelanjutan memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, lingkungan, baik saat ini maupun di masa mendatang, dengan memperhatikan kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat (Dr. Muharto, S.Pd.I., 2021)”. Sebagai landasan dalam penerapan konsep pariwisata berkelanjutan terdapat tiga aspek mendasar yang saling berkaitan perlu diperhatikan, yaitu (1) aspek lingkungan (*The environment*), (2) aspek sosial budaya (*socio-cultuar dimension*), (3) aspek ekonomi (*economic dimension*) yang kesemuanya menuntut keseimbangan dalam praktiknya (Swarbrooke di kutip dari *WTO & UNEP* dalam Dr. Muharto, S.Pd.I., 2021). Penerapan ketiga aspek tersebut dapat dilihat pada desa Cikolele. Desa Wisata Cikolelet berhasil masuk peringkat 50 besar sebagai Desa Wisata terbaik secara Nasional dari total 1.831 dalam Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021. Desa Cikolele unggul dalam sentra ekonomi kreatif berupa kerajinan tangan lokal dari limbah plastik yang di daur ulang, anyaman atap dari daun rumbia, produksi susu kambing etawa dan pembuatan emping melinjo. Penyedian akomodasi yang dekat dengan masyarakat dapat di temukan di desa ini dengan memberikan pesona pemandangan alam pegunungan yang terjaga dengan baik sehingga meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat (Reza, 2023).

3. Kebijakan Pemerintah dan Program Propinsi Banten

Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka pengembangan pariwisata berkelanjutan berdasarkan Undang Undang No 10 Tahun 2009 yaitu : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Propinsi (RIPPARPROV) yang di tuangkan

SEMINASIA

(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

“Membangun Bangsa Melalui Pembangunan Ekonomi Perdesaan”
25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

melalui Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 dan Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan Kabupaten /Kota (RIPPARKAB/KOT) yang di tuangkan melalui Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 tentang tanggung Jawab Sosial kemitraan dan bina Lingkungan perusahaan. Inisiatif Pelestarian Tempat Pariwisata untuk meningkatkan Keberlanjutan dan Daya Tarik Wisatawan.

Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan berbagai program strategis untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Diantaranya: revitalisasi Kawasan Banten Lama, Pengembangan Eko-Eduwisat serta Inisiatif Pelestarian tempat Pariwisata, Pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4. Tantangan dalam pengembangan Pariwisata berkelanjutan

Walaupun memiliki potensi besar, pengembangan pariwisata di Propinsi Banten menghadapi tantangan. Tantangan dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan harus diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku industri (Wardana et al., 2025). Menurut (El Archi et al., 2023) terdapat beberapa tantangan dalam mengelola pariwisata secara berkelanjutan, antara lain: (1) *Overtourism*, kondisi dimana banyaknya jumlah wisatawan melebihi kapasitas infrastruktur dan lingkungan yang ada. (2) Pengelolaan Sumber daya alam tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan ekosistem alam. (3) dampak sosial dan budaya,

dapat menimbulkan signifikan, termasuk, perubahan gaya hidup, nilai-nilai dan tradisi setempat. (3) perubahan Iklim, berdampak signifikan terhadap destinasi pariwisata, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola cuaca dan peningkatan resiko bencana alam. (4) Pengelolaan Limbah dan Polusi yang dapat mencemarkan lingkungan. (5) Kurangnya infrastruktur seperti masih banyak jalan yang rusak, tidak tersedianya layanan transportasi yang layak, Penginapan yang jauh dari standar harapan wisatawan, dan layanan. Selain itu, manajemen tempat wisata kawasan belum terintegrasi satu sama lain, ketidakjelasan kepemilikan tempat wisata sehingga sering terjadi konflik antara kebutuhan pariwisata pelestarian lingkungan dengan masyarakat sekitar (Jamilati et al., 2023).

5. Strategi pengembangan Berkelanjutan di Propinsi Banten

Beberapa strategi pengembangan yang sudah di lakukan diantaranya adalah strategi pengembangan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya dalam aspek keterlibatan dan keahlian manajerial yang meliputi pengelolaan keuangan, pemasaran, serta operasional (Cikolelet, 2024).

6. Studi Kasus; Keberhasilan dan Pembelajaran Destinasi Wisata Banten

Wilayah Banten dikenal memiliki beragam potensi pariwisata yang mencakup kekayaan budaya, peninggalan sejarah, serta keindahan alam yang khas. Studi kasus pencapaian dalam pengelolaan destinasi wisata

SEMINASIA

(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

“Membangun Bangsa Melalui Pembangunan Ekonomi Perdesaan”

25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

berkelanjutan sekaligus mengidentifikasi keberhasilan dan pelajaran dapat di lihat pada strategi revitalisasi pengembangan pariwisata pantai berkelanjutan Legon Guru Seaside di desa Cigorondoong, Kecamatan Sumur, Ujung Kulon. Pantai legon Guru menjadi pantai yang terkena imbas dari bencana alam tsunami Pada tahun 2018. Dampak bencana ini sangat signifikan dalam melemahkan infrastruktur wisata yang ada dan menyebabkan penurunan jumlah pengguna wisatawan. Pemerintah melakukan revitalisasi tidak hanya melibatkan pembangunan infrastruktur tetapi juga pemulihian ekosistem pesisir yang rusak. Revitalisasi wilayah pantai merupakan langkah penting dalam meningkatkan sektor pariwisata yang berkelanjutan, dengan menjaga keseimbangan alam (Funduk et al., 2024). Mereka menyoroti bahwa pendekatan berkelanjutan dalam revitalisasi, yang mencakup restorasi ekologis meningkatkan daya tarik wisata sekaligus melindungi lingkungan. Pendekatan terpadu dalam pengelolaan wisata pantai, yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal untuk menciptakan model pengelolaan yang berkelanjutan dan efektif (Mukti, 2024).

7. Peran Stakeholder

Dalam pengembangan pariwisata memerlukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stake holder*)

yaitu : Pemerintah, Masyarakat dan pengusaha. Stakeholder adalah orang atau bisa juga perusahaan yang terlibat dalam suatu organisasi, proyek atau sistem karena dana yang mereka investasikan pada organisasi, proy atau sistem tersebut. Dalam sektor pariwisata, istilah stakeholder banyak digunakan untuk merujuk kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan pariwisata di suatu tempat (Astriyantika & Cahyo, 2025).

C. PENUTUPAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis membuat beberapa poin untuk menjadi bahan rekomendasi yakni: Pertama, sosialisasi dan diskusi seharusnya rutin di berikan kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan., Kedua, Mempromosikan destinasi wisata baik melalui online maupun offline untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Standarisasi harga harus di terapkan demi menjaga kenyamanan wisatawan, seperti standarisasi harga yang mencakup harga masuk , tiket parkir kendaraan , harga makanan dan minuman produk dan jasa lainnya a demi untuk memelihara kenyamanan wisatawan. Adapun rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yakni melakukan kajian evaluasi kebijakan untuk menilai output program kebijakan pariwisata berbasis *sustainable development* di Propinsi Banten.

REFERENSI

- Allokendek, M. L., Rondonuwu, D. M., & Sela, R. E. (2024). *Kajian Awal Pengembangan Wisata Bahari Berkelanjutan Di Kawasan Pesisir Perkotaan Manado*. 13(4), 690-700.
- Astriyantika, M., & Cahyo, E. D. (2025). *Pemetaan Peran dan Kolaborasi Stakeholder dalam Pengelolaan Ekowisata serta Pengembangan Ekonomi Kreatif Sentra Tapis*

SEMINASIA

(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

"Membangun Bangsa Melalui Pembangunan Ekonomi Perdesaan"
25 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Lampung di Desa Wisata Lugusari , Provinsi Lampung Mapping the Role and Collaboration of Stakeholders in Ecotourism Management and Creati. 9(1), 24-32.
Cikolelet, W. (2024). Strategi Pengembangan SDM untuk Keberlanjutan Desa. 1, 1-15.
Darma, B. A. (2019). Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim Di Provinsi Banten. Jurnal Ekonomi-Qu, 9(1), 73-96.
<https://doi.org/10.35448/jequ.v9i1.5437>

Dr. Arifin Tahir, M. S. (201 Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (1 (ed.)). Alfabeta.

Dr. Muharto, S.Pd.I., Ms. (2021). Pariwisata Berkelanjutan: Kombinasi Strategi dan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan (Pertama (ed.)).

Elizabet Sagala, A. (2024). Analisis Pilar Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Taman Nasional Ujung Kulon, Indonesia. Jurnal Akademi Pariwisata Medan, 11(2).
<https://doi.org/10.36983/japm.v11i2.452>

Funduk, M., Biondić, I., & Simonić, A. L. (2024). Revitalizing Rural Tourism: A Croatian Case Study in Sustainable Practices. Sustainability (Switzerland), 16(1).
<https://doi.org/10.3390/su16010031>

Indriani, I. (2025). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Melalui Pengembangan Ekowisata Di Kabupaten Berau Kabupaten Berau merupakan salah satu sektor ekstraktif, seperti batu bara dan kayu . kontribusi besar terhadap pendapatan daerah. 9(1).

Jamilati, N., Anshori, M. I., & Salsabila, S. N. (2023). Penggunaan Teknologi Digital Untuk Meningkatkan Kinerja Pengelola Pariwisata Berkelanjutan Studi Kasus di Kabupaten Bangkalan. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 154- 169.

Mohamad Ridwan, S.T., M.Sc., Dr. Windra Aini, M. M. (2019). Perencanaan Pengembangan Daerah Tujuan Pariwisata (1st ed.).

Mukti, T. (2024). Legon Guru Seaside sebagai Strategi Revitalisasi Pengembangan Pariwisata Pantai Berkelanjutan di Ujung Kulon Legon Guru Seaside as a Revitalization Strategy for Sustainable Coastal Tourism Development in Ujung Kulon How to cite: Titania Mukti , dkk . , " . 1(2), 108-123.

Pradana, G. Y. K. (2019). Sosiologi Pariwisata (1st ed.). STPBI PRESS.

Reza, M. S. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Media Promosi Oleh Akun @klinklinkkopi. 1(5903), 289-297.

Santoso, Jo. (2019). Administrasi Publik : Sustain able Development Goals(SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Sharpley, R. (2000). Tourism and sustainable development: Exploring the theoretical divide. Journal of Sustainable Tourism, 8(1), 1-19.
<https://doi.org/10.1080/09669580008667346>

Wardana, K. A., Made, N., & Primayani, D. (2025). Inovasi dan tantangan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di bali.